

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Transmigrasi merupakan salah satu program kependudukan yang telah lama dicanangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Secara kontekstual tujuan pelaksanaan transmigrasi adalah untuk penyebaran penduduk secara merata di Indonesia, Pemanfaatan sumber daya alam di daerah yang masih jarang penduduknya dengan menggunakan sumber daya yang berasal dari daerah luar. Dengan demikian maka diharapkan kesejahteraan masyarakat lokal dan transmigran dapat meningkat. Secara umum ada empat sasaran umum atau tujuan pembangunan pemukiman transmigrasi yakni, *pertama* membangun desa-desa baru melalui pembangunan unit pemukiman transmigrasi. *Kedua*, membangun *hinterland* dari pusat-pusat pertumbuhan yang ada melalui pembangunan unit-unit pemukiman transmigrasi yang terintegrasi dengan pusat-pusat pertumbuhan tersebut. *Ketiga*, mendorong pertumbuhan desa-desa yang kurang berkembang, melalui penambahan penduduk dan pembangunan prasarana, dan *terakhir* transmigrasi bertujuan untuk memberdayakan penduduk sekitar melalui pengembangan keswadayaan¹.

Dilihat dalam konteks kebangsaan, sepertinya program transmigrasi yang dilaksanakan semenjak masa pemerintahan presiden Soekarno merupakan usaha dalam

¹Siswono Yudohusodo.1998. *Transmigrasi : Kebutuhan Negara Kepulauan Berpenduduk Heterogen dengan Persebaran yang Timpang*. Jakarta: PT .Jurnalindo Aksara Grafika. Hal 104

mempersatukan bangsa Indonesia melalui bidang sosial dan budaya. Sejak dahulu, yang menjadi objek dalam pelaksanaan program transmigrasi adalah masyarakat dari Pulau Jawa, Madura, Bali dan belakangan Nusa Tenggara, namun dari semua itu mayoritas peserta transmigrasi adalah etnis Jawa. Ditinjau dari keadaan pulau Jawa yang penduduknya sangat padat dibandingkan dengan pulau – pulau lain di Indonesia, maka selalu dilaksanakan dari pulau Jawa ke pulau – pulau lainnya di luar pulau Jawa seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan sebagainya².

Selain pola transmigrasi yang umum dikenal, yakni pemindahan penduduk dari pulau Jawa ke luar Jawa juga terdapat jenis transmigrasi yang lain yakni transmigrasi lokal, atau pada zaman orde baru disebut sebagai transmigrasi masyarakat perambah hutan. Program ini dilakukan untuk memindahkan penduduk dari daerah-daerah pegunungan ke dataran yang dapat diakses oleh kendaraan bermotor. Oleh sebab itu, pemindahan penduduk dianggap sebagai langkah positif untuk mengintegrasikan penduduk pegunungan/pedalaman dengan masyarakat yang lebih luas. Pemindahan penduduk semacam ini telah ada sejak zaman Kolonial Belanda dan mengalami puncaknya pada masa Orde Baru.

Bersamaan dengan gencarnya program transmigrasi. Pulau Sulawesi merupakan salah satu wilayah yang banyak diterapkan program transmigrasi lokal tersebut, karena beberapa kelompok masyarakatnya berdomisili di wilayah pegunungan³. Secara

²Levang Patrice. 2003. *Ayo ke Tanah Sabrang*. Jakarta : KPG (Kepustakaan Populer Gramedia). hal 29

³Henley, D. dan Davidson, J. 2010. *Adat Dalam Politik Indonesia* terjemahan Emilius Ola Kleden dan Nina Dwisasanti. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan KITLV-Jakarta. Hal 14

historis pola pemukiman di wilayah pegunungan yang jauh dari garis pantai adalah salah satu ciri khas dari suku-suku pribumi yang mendiami Sulawesi Tengah. Catatan-catatan perjalanan Albert C. Cruyt misalnya menyebutkan suku Mori di bagian selatan Sulawesi Tengah bermukim di pegunungan dengan menganut agama suku sebagai sistem kepercayaan. Sementara itu, penghuni lembah Palu yang kini menjadi Ibu Kota Sulawesi Tengah juga merupakan penduduk yang sebelumnya bermukim di wilayah pegunungan⁴.

Balantak merupakan daerah yang sebagian besar permukaannya terdiri dari perbukitan dengan tingkat kecuraman bervariasi. Kondisi demikian menjadi salah satu aspek yang turut mempengaruhi corak dan pola pemukiman sebagian masyarakat di wilayah ini yang memilih tinggal di dataran tinggi dan pegunungan. Dilihat dari aspek geneologis masyarakat Balantak mendasarkan asal muasal nenek moyangnya dari gunung *Kau Totolu* sehingga sistem religi yang berkembang juga sangat mensakralkan gunung tersebut. Selain itu, wilayah pegunungan juga menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat Balantak, di mana di tempat ini aktifitas bercocok tanam dengan sistem ladang berpindah (*roofbouw*) atau huma dilakukan.

Sampai dengan tahun 1970-an masih ada penduduk di kecamatan Balantak yang bermukim di wilayah pegunungan. Hal ini membuktikan bahwa kebijakan relokasi oleh pemerintah kolonial tidak sepenuhnya terlaksana, sehingga masih ada pemukiman-pemukiman di pegunungan, termasuk di wilayah Tinonda hingga tahun 1979.

⁴Albert C. Cruyt, *Het Rijk Mori*, 1979. diterjemahkan menjadi "Kerajaan Mori" oleh B. Pandjaitan. Jakarta: Yayasan Idayu. Hal 4-5

Masyarakat yang tidak direlokasi pada masa kolonial tersebut akhirnya kembali direlokasi pada tahun 1979 semasa pemerintahan Orde Baru, hal ini dapat dilihat pada tugu kecil di pegunungan Tinonda yang dijadikan sebagai monumen peringatan peristiwa tersebut. Tujuan relokasi penduduk yang terakhir ini adalah wilayah barat kecamatan Lamala kala itu dan sejak tahun 2006 dimekarkan menjadi kecamatan Masama.

Pemilihan daerah lembah Masama sebagai tujuan transmigrasi lokal cukup beralasan sebab wilayah tersebut memiliki lahan datar cukup luas. Selain itu, terdapat juga beberapa unit pemukiman transmigrasi dari Pulau Bali (etnik Bali) yang dianggap dapat menjadi contoh kesuksesan program transmigrasi hingga saat ini. Oleh sebab itu, seperti kutipan Siswono di atas bahwa para transmigran lokal (etnik Balantak) dapat belajar dari etnik lainnya yang telah ada di lokasi tersebut. Tujuan akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan transmigran lokal dan perambahan hutan di pegunungan Balantak dapat dikurangi.

Pencapaian program transmigrasi lokal warga Tinonda di lembah Masama ternyata tidak seindah bayangan dan janji pemerintah. Warga yang sebelumnya dijanjikan lahan persawahan dan biaya hidup bulanan harus kecewa, sebab hingga beberapa bulan tiba di lokasi penempatan janji tersebut tidak pernah ditepati. Hal ini berakibat pada kehidupan masyarakat yang semakin sengsara di awal penempatan di wilayah baru. Kenyataan tersebut tentu sangat berbeda dengan penyelenggaraan transmigrasi umum yang diikuti etnik Jawa dan Bali. Seperti diketahui bahwa transmigran Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara pasti mendapat bantuan seperti alat-alat

pertanian, lahan persawahan dan pemukiman, serta biaya hidup selama satu musim panen dari pemerintah. Berbeda dengan program transmigrasi lokal yang diikuti oleh etnik Balantik di Tinonda. Dari beberapa fasilitas yang dijanjikan, hanya rumah sederhana beralaskan tanah yang diberikan pemerintah. Oleh sebab itu, secara umum transmigrasi lokal di wilayah ini mengalami kendala ekonomi sejak awal penempatannya pada tahun 1979⁵.

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka menarik untuk dilakukan penelitian dengan formulasi judul “**Transmigrasi Lokal di Kabupaten Banggai** (*Studi Sejarah Sosial Tinonda tahun 1979-2000*)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dapat ditentukan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pelaksanaan Transmigrasi lokal pada masyarakat Tinonda?
2. Bagaimana dampak Transmigrasi terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat Tinonda?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat ditentukan tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan Transmigrasi lokal pada masyarakat Tinonda.

⁵Wawancara dengan Yoram Balamba tanggal 3 Juli 2017 di Desa Tinonda.

2. Untuk mengetahui dampak Transmigrasi terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat Tinonda.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup spasial dari penelitian ini adalah Kecamatan Balantak dan kecamatan Lamala yang dijadikan sebagai lokasi penempatan transmigran lokal Tinonda. Kecamatan Balantak adalah wilayah pemukiman awal masyarakat Desa Tinonda. Untuk diketahui bahwa wilayah Kecamatan Lamala yang dijadikan sebagai lokasi pemindahan masyarakat tinonda secara geografis berada pada dataran rendah sekitar 30 KM sebelah barat kecamatan Balantak. Di lokasi ini banyak transmigran ditempatkan, baik di luar pulau seperti etnik Bali maupun dalam pulau seperti masyarakat Desa Tinonda. Selain itu terdapat pula imigran dari suku Bugis dan Jawa yang datang ke lokasi karena peluang-peluang ekonomi. Secara lebih spesifik lokasi penelitian ini akan fokus di desa Tinonda yang dibentuk sejak tahun 1979 di wilayah kecamatan Lamala.

Ruang lingkup temporal penelitian ini dimulai pada tahun 1979 saat masyarakat Desa Tinonda pertama kali dipindahkan ke wilayah penempatan yang telah disediakan pemerintah. Meskipun demikian, periode sebelum 1979 juga berusaha diketahui sebab sangat diperlukan gambaran mengenai kondisi masyarakat Tinonda sebelum direlokasi. Sementara itu, tahun 2000 dipilih sebagai batas akhir penelitian ini, dengan alasan bahwa pada saat ini secara nasional terjadi perubahan yang cukup menonjol dalam berbagai bidang. Hal ini merupakan dampak dari runtuhnya rezim orde baru pada tahun 1998. Artinya tahun 2000 dianggap krusial sebab secara umum masyarakat

Tinonda lepas dari rezim yang telah banyak memberi fasilitas terutama untuk tujuan-tujuan ekonomi dan politik. Runtuhnya rezim Orde Baru sama dengan putusnya program-program yang selama ini terkesan mengistimewakan masyarakat transmigran.

E. Tinjauan Pustaka

Pada penulisan skripsi ini, sumber yang akan digunakan berupa buku-buku dan sumber lisan sebab informan terkait penelitian ini masih hidup sampai sekarang. Meskipun demikian, penulis akan meninjau beberapa pustaka yang relevan, baik dalam aspek tema maupun lokasi.

Buku pertama yang banyak memuat informasi tentang Balantak dan Tinonda pada masa kolonial adalah *Banggaische Adatrecht* (Hukum Adat Banggai) karangan J.J. Dormeier yang merupakan disertasi doktoral di *Rijks Universiteit* Leiden pada tahun 1945. Meski memiliki orientasi bahasan pokok pada masalah hukum adat namun karya ini sangat kaya akan informasi spesifik tentang Balantak, baik menyangkut penduduk, bahasa, adat istiadat dan sejarah masyarakat Balantak kala itu. Hal ini sangat rasional karena Dormeier pernah menjadi *kontroleur* (1935-1938) di *oenderafdeling* Luwuk yang salah satu wilayahnya adalah Balantak.

Selain Kruyt dan Dormeier, ahli linguistik asal Amerika Serikat yang merupakan pasangan suami istri Marilyn J. Busenitz dan Robert J. Busenitz pernah berdomisili cukup lama (1981-1993) dan melakukan penelitian mengenai bahasa Balantak yang menghasilkan kamus bahasa Inggris-Balantak dan terjemahan *bible* (al-kitab) dalam bahasa Balantak. Selain itu, sebuah artikel dalam bahasa Indonesia yang berjudul “Permaskah Fokus dalam Bahasa Balantak” pernah dimuat dalam majalah kampus

UNHAS *Lontar* no. 34 tahun ke XXVI 1987. Hal 26-42. Artikel lainnya yang dikarang pasangan ini pada tahun 1992 adalah “Spatial deixis in Balantak” yang memuat penjelasan umum tentang bahasa Balantak sebagai salah satu rumpun bahasa Austronesia. Digunakan oleh 25.000-30.000 penduduk di wilayah kecamatan Balantak dan Lamala kabupaten Banggai provinsi Sulawesi Tengah. Selebihnya dalam artikel ini hanya mendeskripsikan tata bahasa (grammar) dan cara-cara pengucapan dalam bahasa Balantak.

Karya besar dari David Henley yang diterbitkan pertama kali oleh KITLV Leiden tahun 2005. Buku ini diberi judul *Fertility, Food and Fever: Population, Economy and Environment in North and Central Sulawesi, 1600-1930*, merupakan studi mengenai sejarah sosial ekonomi dan lingkungan masyarakat di Sulawesi Utara dan Tengah pada kurun waktu tersebut. Meski hanya mendasarkan studinya pada arsip dan artikel-artikel yang dibuat pada masa kolonial, sesungguhnya buku ini memberi sangat banyak informasi tentang wilayah di atas pada rentang waktu yang telah banyak dilupakan oleh penduduk setempat, termasuk masyarakat Balantak. Selain muatan pengetahuan masa lalu, secara teknis buku ini sangat membantu dalam pelacakan sumber-sumber tertulis pertama mengenai Balantak dan sekitarnya, baik sebagai wilayah teritorial maupun kelompok suku. Dengan demikian, buku ini dapat menjadi salah satu sumber dalam penelitian yang nanti akan dilakukan penulis.

Karya penulis lokal yang memuat beberapa informasi historis tentang Balantak adalah “Sejarah Banggai dalam Lintasan Sejarah Indonesia” jilid I (1997, tidak diterbitkan) dan “Sepintas Kilas Sejarah Banggai” (diterbitkan tahun 2005 oleh Raja

Grafindo Persada). Keduanya merupakan karangan Henry Sibold Padeatu yang tidak hanya mendasarkan sumbernya pada kedua sumber kolonial di atas (Kruyt dan Dormeier), tetapi juga memuat hasil wawancara dengan beberapa tokoh lokal. Meskipun tidak membahas secara detail tentang Balantak namun karya ini cukup membantu dalam penelusuran sumber-sumber primer tertulis yang memuat informasi mengenai sejarah Balantak.

Penelitian ilmiah yang secara spesifik membahas Balantak ditinjau dari aspek antropologi dilakukan oleh Ester Sonya Ulfarietha Lapalu Kutika pada tahun 2004-2005 yang menghasilkan karya berjudul “Ritus Mombolian Orang Sakit di Suku Balantak” (studi pendampingan orang sakit di GKLK klasis Balantak). Karya ini merupakan Tesis yang dipersembahkan untuk memperoleh gelar Magister Sosiologi Agama di Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga. Walaupun berbentuk studi antropologi dengan fokus pada ritus pengobatan, namun ada beberapa informasi sejarah yang terdapat di dalamnya, seperti sejarah asal muasal Balantak (dalam tradisi lisan) dan terutama informasi tentang awal masuknya agama Kristen di Balantak.

Studi ilmiah yang secara spesifik membahas program transmigrasi lokal di Kabupaten Banggai dan Balantak secara khusus masih sangat langka bahkan bisa dikatakan belum dilakukan. Oleh sebab itu, kiranya menjadi relevan untuk meninjau pustaka yang ditulis oleh Siswono Yudohusodo yang berjudul *Transmigrasi Kebutuhan Negara Kepulauan Berpenduduk Heterogen Dengan Persebaran yang Timbang*. Siswono adalah mantan Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan selama 5 tahun pada masa Orde Baru. Buku ini relevan ditinjau, sebagai

perbandingan untuk penelitian mengenai masyarakat Tinonda sebab terdapat salah satu bab yang membahas tentang transmigran perambah hutan dan peladang berpindah. Seperti diketahui bahwa masyarakat Tinonda sebelum ditransmigrasikan adalah kelompok petani dengan sistem ladang berpindah. Kategori yang dibuat oleh Siswono sangat membantu dalam menganalisis pola dan bentuk transmigrasi lokal di Tinonda. Meskipun ada beberapa yang dikutip pada buku ini, akan tetapi terdapat perbedaan signifikan dengan penelitian yang telah dilakukan. Terutama berkaitan dengan lokasi dan pendekatan.

F. Kerangka Konseptual dan Pendekatan

Konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini terutama terkait konsep sosiologi seperti migrasi, transmigrasi dan mobilitas sosial. Transmigrasi merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam mengambil keputusan, guna tercapainya keseimbangan penyebaran penduduk, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan produktifitas dan peningkatan pendapatan bagi mereka yang menjadi masyarakat transmigran. Transmigrasi penting bagi pembangunan nasional. Program transmigrasi ini merupakan sebuah alternatif bagi mereka yang kesulitan mendapatkan lapangan pekerjaan yang dikarenakan minimnya lahan yang bisa di kelola untuk pertanian, maka secara otomatis, angka pengangguran yang menyebabkan kemiskinan pada masyarakat yang akan berdampak pada pembangunan Negara. Dalam menangani permasalahan ini, pemerintah memutuskan agar sebagian masyarakat yang tinggal dalam wilayah yg penduduknya sangat padat, akan di transmigrasikan ke daerah daerah

yang penduduknya masih sangat jarang, serta, tersedianya lahan yang nantinya bisa digarap oleh masyarakat transmigran ini⁶.

Transmigrasi adalah alat atau cara membangun daerah melalui proses perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Proses perpindahan itu pada hakikatnya adalah proses pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pengembangan dan pemanfaatan potensi sumber daya alam secara optimal⁷.

Undang-undang No. 15/1997 tentang Ketransmigrasian menjelaskan bahwa transmigrasi merupakan perpindahan penduduk dari suatu daerah wilayah ke wilayah lain dalam lingkup wilayah Negara Indonesia. Tujuan kebijakan transmigrasi adalah tercapainya pemerataan penyebaran penduduk secara nasional dan juga tenaga kerja yang menandai untuk membangun dan mengembangkan sumber daya di wilayah-wilayah yang produktif di luar pulau jawa, khususnya melalui pemukiman kembali penduduk dengan mengembangkan pertanian.

a. Jenis Transmigrasi

Di dalam membicarakan perpindahan penduduk akan selalu terkait dengan tempat/wilayah. Dalam lingkup tempat mulai dari lingkup administrasi terkecil: RT/RW, desa, hingga perpindahan antar negara. Juga dari sisi waktu, mulai dari satu

⁶Siswono Yudohusodo.1998. *Transmigrasi : Kebutuhan Negara Kepulauan Berpenduduk Heterogen dengan Persebaran yang Timpang*. Jakarta: PT .Jurnalindo Aksara Grafika. Hal 77

⁷Mirwanto Manuwiyoto, 2004. *Mengenal dan Memahami Transmigrasi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Hal 40

hari sampai waktu yang cukup lama. Transmigrasi dapat dibedakan atas beberapa jenis antara lain :

- a. *Pertama*, adalah *Transmigrasi Umum (TU)*, yaitu jenis transmigrasi yang sepenuhnya diselenggarakan oleh pemerintah. Artinya, keseluruhan proses pelaksanaan transmigrasi (proses perpindahan, penyediaan ruang, dan pemberdayaan) menjadi tanggung jawab pemerintah, sedangkan transmigran mendapat bantuan, dan bila perlu mendapat subsidi dari pemerintah.
- b. *Kedua*, adalah *Transmigrasi Swakarsa Berbantuan (TSB)*, yaitu jenis transmigrasi yang di rancang oleh pemerintah dan dilaksanakan bekerjasama dengan dengan Badan Usaha. Peranan Pemerintah adalah membantu dalam batas tertentu agar kemitrausahaan Badan Usaha dengan transmigran berjalan setara, adil, dan berkesinambungan, agar kedua pihak saling memperoleh keuntungan.
- c. *Ketiga*, adalah *transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM)*, yaitu jenis transmigrasi yang sepenuhnya merupakan prakarsa transmigran yang dilakukan secara perseorangan atau kelompok, baik melalui kerjasama dengan Badan Usaha maupun sepenuhnya dikembangkan oleh transmigran bersangkutan.

b. *Transmigrasi Lokal*

Pemindahan penduduk keluar jawa, semenjak tahun 1953 jawatan Transmigrasi telah pula menyelenggarakan pemindahan dari dari daerah provinsi setempat di luar jawa. Pemindahan ini disebut Transmigrasi Lokal. Maksud adalah untuk memberi kesempatan pula pada penduduk asli turut serta mengengam bantuan pemerintah dengan cara transmigrasi keobjek-objek yang di buka oleh jawatan transmigrasi untuk transmigrasi umum biasa, guna memperbaiki kehidupan mereka. Dari seluruh penempatan ditiap-tiap daerah penyelenggaraan karenakan 20% disediakan untuk transmigrasi lokal ini⁸.

⁸Djawatan Transmigrasi, *Transmigrasi 1951-1955* (Djakarta Djawatan Transmigrasi, 1956)

Secara garis besar, penelitian ini merupakan penelitian sejarah sosial dengan menggunakan pendekatan sosiologi. Pendekatan ini digunakan untuk mempermudah peneliti menganalisis setiap peristiwa yang terjadi selama proses pemindahan penduduk dari wilayah pegunungan ke wilayah dataran. Konsep-konsep sosiologi seperti, migrasi dan mobilitas sosial digunakan untuk melihat setiap gejala selama periode penelitian.

G. Metode Penelitian

Sebagai sebuah disiplin ilmu maka dalam aplikasinya sejarah memiliki metode penelitian sendiri yang secara umum dikenal dalam empat tahap penelitian sejarah, akan tetapi sebelum itu perlu dituliskan alasan pemilihan topik penelitian ini yang sesungguhnya merupakan percampuran antara subjektivitas dan objektivitas.⁹ Alasan pertama yang sifatnya subjektif adalah karena penulis secara geografis dan kultural terlahir dari tempat tersebut, sehingga terkait secara emosional dengan objek dan masalah penelitian. Sementara itu alasan objektifnya adalah karena secara intelektual penulis telah mengetahui gambaran umum dari objek dan topik yang nantinya akan diteliti lebih mendalam. Setelah topik dipilih maka dimulailah langkah-langkah penelitian sejarah sebagai berikut:

a. Heuristik (pengumpulan sumber)

⁹Terkait alasan pemilihan topik dalam penelitian sejarah, Kontowijoyo sesungguhnya telah memberi petunjuk bahwa sedapat mungkin seorang peneliti mempertimbangkan dua hal yakni kedekatan intelektual dan emosional dengan topik penelitian. Hal ini didasari oleh anggapan bahwa, pertimbangan akan salah satu atau keduanya dari aspek di atas akan memudahkan peneliti dalam melakukan pekerjaannya. Lebih jelasnya lihat Kontowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1995), hlm. 91-92.

Pengumpulan sumber dalam penelitian ini dimulai dari observasi lapangan yang dilakukan penulis pada pertengahan bulan Mei 2016 ke wilayah pegunungan Tinonda. Kala itu penulis mendapati sebuah tugu peringatan pemindahan (relokasi) penduduk Tinonda dari kecamatan Balantak menuju kecamatan Lamala (Masama saat ini) dengan angka tahun 1979. Tugu tersebut memicu rasa penasaran peneliti untuk menggali lebih dalam dan menelusuri lebih jauh perihal berpindahnya penduduk Tinonda. Selain itu, di lokasi tersebut masih terdapat pondasi-pondasi batu, yang merupakan bekas rumah yang telah ditinggalkan. Cerita-cerita yang hidup dalam masyarakat juga cukup detail menjelaskan proses relokasi yang terjadi terhadap penduduk pegunungan Tinonda baik pada masa kolonial maupun orde baru. Selain cerita dari warga yang direlokasi, peneliti juga mendapatkan informasi mengenai relokasi di Tinonda dari penduduk di desa-desa sekitar yang sejak saat itu hingga sekarang masih cukup sering berinteraksi dengan warga Tinonda. Penggunaan sumber lisan terasa sangat penting dalam penelitian ini, terlebih jika sumber tertulis tidak mampu sepenuhnya mengungkap jawaban dari persoalan-persoalan pokok yang diteliti.¹⁰

Selain itu didapatkan juga sumber tertulis karangan J.J. Dormeier yang menyebutkan adanya pemindahan (relokasi) penduduk pegunungan ke dataran rendah dan pesisir oleh pemerintah kolonial Belanda di wilayah Balantak. Proses serupa juga terjadi di daerah lain seperti tulisan J. Kruyt yang memuat berita tentang relokasi

¹⁰Sebagaimana diungkapkan oleh Taufik Abdullah bahwa “Begitulah umpamanya kalau kajian-kajian tertulis telah habis, sedang lubang-lubang informasi dalam usaha untuk mendapatkan rekonstruksi yang relatif utuh belum tercapai maka kenapa tidak digunakan pula sejarah lisan” lihat Taufik Abdullah dan Abdurrachman Surjomiharjo, *Ilmu Sejarah dan Historiografi* (Jakarta: PT. Gramedia, 1985), hlm. xv.

penduduk pegunungan di Poso. Sumber ini dapat menjadi bukti komparatif atas peristiwa relokasi di wilayah Balantak. Sumber tertulis lainnya yang cukup penting adalah artikel A. B. Kruyt “Balantaksche Studien” yang sebagiannya telah didapatkan dan selebihnya akan diusahakan untuk diperoleh. Beberapa surat dinas terkait sekolah yang dibuat oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai terkait dengan sekolah dan guru yang ada di Tinonda pada tahun 1970-an juga cukup membantu penulis dalam menetapkan waktu yang sesungguhnya dari peristiwa tersebut.

b. Kritik

Setelah sumber –baik lisan maupun tulisan- telah didapatkan maka tahap selanjutnya adalah proses pemeriksaan kevalidan dan keterandalan sumber-sumber tersebut. Dalam penelitian ini sumber-sumber diperiksa secara teliti dengan menggunakan teknik-teknik kritik sumber yang ada dalam metode penelitian sejarah, yakni dengan mengajukan pertanyaan kritis terhadap sumber-sumber tersebut. Hal ini cukup penting terutama dalam memeriksa sumber-sumber lisan agar terhindar dari mitos yang dapat mengurangi keilmiahannya dari sebuah karya penelitian. Fokus kritik sumber pada sumber lisan karena penelitian ini banyak menggunakan sumber lisan, disamping sumber tertulis yang tersedia. Beberapa aspek yang dikritik terkait dengan informasi keadaan awal masyarakat Tinonda yang cukup memprihatinkan. Ternyata hal ini tidak berlaku untuk semua, sebab ada warga yang mendapatkan rumah, tanah sawah dan lahan kering namun ada pula yang hanya mendapatkan rumah. Selain itu, informasi tentang jumlah kepala keluarga yang dipindahkan (ditransmigrasikan) juga tidak seragam disampaikan oleh beberapa informan. Ada beberapa yang mengatakan

bahwa masyarakat yang mengikuti program transmigrasi sejumlah 39 KK namun di sisi lain ada pula yang menginformasikan 40 KK. Terkait dengan hal tersebut, maka peneliti mendapatkan manuskrip yang ditulis oleh mantan kepala desa bahwa yang ikut dalam program tersebut adalah 39 kepala keluarga.

c. Interpretasi

Setelah melalui tahap kritik sumber maka perlu dilakukan interpretasi terhadap sumber-sumber yang telah diyakini keabsahannya. Hal ini sangat dibutuhkan dalam mendalami sebuah peristiwa relokasi, sebab tanpa analisis dan sintesis akan sulit ditemukan sebuah narasi rasional yang menjadi corak umum dari karya sejarah. Selain itu proses ini juga membuka peluang untuk menemukan aspek kausalitas dari peristiwa relokasi dengan hal-hal lain yang berada di luar peristiwa.

d. Historiografi

Historiografi merupakan tahap akhir dari rangkaian penelitian sejarah, dimana bahan-bahan yang telah dikumpulkan dalam tahap sebelumnya, kemudian dirangkai menjadi sebuah kronologi cerita yang menarik sekaligus ilmiah. Hal ini dilakukan dengan menggunakan tiga teknik dasar penulisan secara bersamaan yakni deskripsi, narasi dan analisis¹¹. Penulisan dalam penelitian ini disusun secara kronologis sejak sebelum perpindahan, proses dan setelah beberapa tahun warga Tinonda menempati wilayah baru. Pada bagian tertentu peneliti melakukan analisis yang sifatnya sigkronik (melebar dalam ruang) seperti corak penulisan dalam ilmu-ilmu sosial lainnya.

H. Sistematika Penulisan

¹¹Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Ombak, 2007), hlm. 157-158.

Penulisan dalam penelitian ini akan dimulai pada :

BAB I Pendahuluan yang meliputi: (a) Latar Belakang, (b) Rumusan Masalah (c) Tujuan Penelitian (d) Ruang Lingkup Penelitian (e) Tinjauan Pustaka (f) Kerangka Konseptual dan Pendekatan (g) Metode Penelitian (h) Sistematika Penulisan. Selanjutnya pada BAB II akan membahas Gambaran Umum Lokasi Penelitian yang terdiri dari: (a) Tinjauan Historis Tinonda Sebelum Transmigrasi, (b) Kondisi Geografis Pegunungan Tinonda, (c) Kondisi geografis Lokasi Penempatan Transmigran, dan (d) Keadaan Penduduk Tinonda.

BAB III membahas Faktor-Faktor Pendorong Program Transmigrasi Lokal di Desa Tinonda yang terdiri dari: (a) Faktor Geografis, (b) Faktor Ekonomi, dan (c) Faktor Politik. Setelah uraian yang bersifat umum pada bab II dan bab III, maka BAB IV akan fokus membahas Proses Pelaksanaan Transmigrasi Lokal di Desa Tinonda yang dibagi dalam beberapa sub bab yakni: (a) Perpindahan Awal Penduduk, (b) Dampak Transmigrasi Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Tinonda. Akhir dari skripsi ini adalah BAB V atau Penutup yang merupakan kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya.